

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 4 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri
Kepada Pegawai Negeri

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International
Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights* (kovenan Internasional
Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

Keputusan Kapolri No 17/VIII/2001 Tentang Ketentuan Penggunaan Perumahan
Dinas di Lingkungan Polri

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang
Perumahan Dinas/Asrama/Mes Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2000
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman
Teknis Pengadaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman
Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan
Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara.

Peraturan Menteri PUPR No 22 tahun 2008

Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara

Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Rumah tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Polri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perumahan Dinas/Asrama/Mess
Polri

Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan
Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

BUKU

Aslan Noor, *Konsep Hak Milik atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006).

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Prof. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 2001).

Rahmadi, S.H. M.H, Sri Soedewi, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008).

Santoso, Urip. *Hukum Perumahan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Sinaga, Sahat, *Jual Beli Tanah Dengan Pencatatan Peralihan*, (Jakarta: Pustaka Sutra, 2007).

Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 2000).

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Pembimbing Masa, 1996)

Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1998).

Sutedi, Adrian, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, (Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2006)

JURNAL

Asri Putri Aprilla, "Problematika Hukum Pengaturan Rumah Negara: Inkonsistensi Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dengan

Pasal 17 ayat (I) angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005”,
Brawijaya Law Student Journal, Februari 2017.

Caecilia Waha dan Jemmy Sondakh, “Pemenuhan Hak atas Perumahan yang
Hetrizta Masfita, “Tindakan Hukum Administratif Terhadap Penghunian Rumah
Negara Golongan II Setelah Pegawai Negeri Pensiun.” Al-Risalah, Maret
2020.

Intan Ghina Maurizka, Maurizka Ananda Rahmadhani, “Kepemilikan Rumah
Dinas Oleh Purnawirawan Tni Berdasarkan Perundang-Undangan.” Law
Review, Vol.19, No.1, Juli 2019.

Layak bagi Masyarakat Miskin di Perkotaan: Suatu Kajian dalam
Muhammad Kharisma, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pemanfaatan
Rumah Negara Selain Sebagai Tempat Tinggal Di Indonesia” Novum Jurnal
Hukum, Vol.7, No.3, Juli 2020

Nia Kurniati, “Pemenuhan Hak Atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang
Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia”, Padjadjaran Jurnal Ilmu
Hukum, Vo.1, No.1,2014

Nia Kurniati, “Pengalihan Hak Rumah Negara Kepada Pegawai Negeri Dalam
Penerapan Hukum Sewa Beli”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.2 No.2,
Maret 2018

Perspektif Hak Asasi Manusia.”. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol.1,
No.2, Januari 2024.

SKRIPSI/KARYA ILMIAH

Anzu Michell Audrey Tanaka, *Perlindungan Hukum Bagi Penghuni Rumah Negara Dalam Menghadapi Tindakan Pengosongan*, (Skripsi, 2019, Universitas Katolik Parahyangan).

Nurul Apriliani Anwar, *Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Rumah Negara Kepada Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Di Kota Makassar*, (Skripsi, 2016, Universitas Hasanuddin)

Ristra Lemdikasari, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemindahan Hak Menempati Rumah Dinas Di Kepolisian*, (Tesis, 2012, Universitas Indonesia).

WAWANCARA

Muhammad Riyan, wawancara, Ketua RT 4, (Asrama Polri Sukajadi Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Bandung: 21 November 2023)

Undang Saepudin Bukhori Muslim, Wawancara, Kepala Asrama, (Asrama Polri Sukajadi Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Bandung: 26 Januari 2024).